

Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Syamsuddin, Muhammad Nur, Mas'ud, Haeril

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email: syamsuddin@stisipbima.ac.id, masud@stisipbima.ac.id,
muhhammad.nur.nu@gmail.com, haeril.terminator@gmail.com

Article Information Abstrak

Submitted: 04

September 2024

Accepted: 11

September 2024

Online Publish: 13

September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi manajerial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk kepala DPMPTSP, staf, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini berlangsung dari 20 Mei hingga 20 Juni 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS berhasil mempercepat proses perizinan dari sebelumnya satu bulan menjadi maksimal satu minggu, serta meningkatkan akurasi layanan melalui validasi data dan otomatisasi. Transparansi juga meningkat dengan adanya portal yang memungkinkan pemantauan status permohonan secara real-time, sedangkan keterjangkauan layanan membaik karena akses online yang mempermudah pemohon dari lokasi terpencil. Kesimpulannya, strategi manajerial yang meliputi peningkatan infrastruktur jaringan, pelatihan petugas, dan penguatan transparansi telah berhasil mengoptimalkan efektivitas sistem OSS, yang mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta efisiensi administrasi, sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi lokal dan daya tarik investasi di Kota Bima.

Kata Kunci: *Strategi; Manajerial; pelayanan Perizinan; OSS.*

Abstract

This study aims to evaluate managerial strategies for enhancing the effectiveness of licensing services through the implementation of the Online Single Submission (OSS) system at the Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP) of Bima City. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation from various sources, including the head of DPMPTSP, staff, business operators, and the community. The study was conducted from May 20 to June 20, 2024. The findings indicate that the implementation of OSS successfully accelerated the licensing process from a previous duration of one month to a maximum of one week, and improved service accuracy through data validation and automation. Transparency also improved with the introduction of a portal that allows real-time monitoring of application statuses, while service accessibility enhanced due to online access, facilitating applicants from remote locations. In conclusion, managerial strategies involving infrastructure improvement, staff training, and enhanced transparency have effectively optimized the OSS system, supporting bureaucratic reform, increasing public satisfaction and administrative efficiency, and strengthening local economic development and investment attractiveness in Bima City.

Keywords: *Strategy; Managerial; Licensing Services; OSS.*

How to Cite

Syamsuddin, Muhammad Nur, Mas'ud, Haeril/Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima /Vol 5 No 4 (2024)

DOI
e-ISSN

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.478>

Published by

2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Revolusi industri telah membawa perubahan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi dan pekerjaan (Tasrif & Haeril, 2024). Perubahan besar ini menggeser banyak aktivitas dari proses manual menuju digital (Lestariningsy & Roqib, 2021). Salah satu dampak signifikan dari transformasi ini adalah peluang bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Nike et al, 2024). Adopsi teknologi, khususnya dalam bentuk e-government, semakin dipercepat untuk meningkatkan pelayanan publik melalui sistem berbasis teknologi yang menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat penyampaian layanan (Assegaf et al., 2019; Wardani et al., 2024);. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional (Robby, U. B. dan Tarwini, 2019); (Setiadi et al., 2021).

Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi semakin mendesak dan strategis (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021). Teknologi seperti aplikasi daring, big data, dan kecerdasan buatan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi, serta mempercepat respons terhadap permintaan layanan masyarakat (Pujiono et al., 2022); (Farah & Astuti, 2020). Meskipun demikian, tantangan global dan nasional seperti kesenjangan akses teknologi, integrasi sistem lama dengan teknologi baru, serta isu keamanan siber, perlu dihadapi dengan bijaksana (Naipos-Pos, 2021).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola sistem informasi baik elektronik maupun non-elektronik (Rahayu et al., 2021). Pemerintah diharapkan mampu menyediakan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Rosidi, 2022). Banyak instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, mulai mengadopsi sistem e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka (Agung et al., 2022).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperbaiki proses perizinan (Aji Putra, et., al, 2022); (Prabawati et al., 2018). Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses perizinan yang rumit dan memerlukan kehadiran fisik dengan prosedur yang lebih efisien dan aksesibel secara online (Wulandari et al., 2023). Meskipun penerapan OSS telah membawa perubahan positif, seperti peningkatan jumlah permohonan perizinan dan layanan konsultasi, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya (Putri et al., 2019). Gangguan jaringan dan kesalahan sistem mengakibatkan ketidakpastian waktu dalam proses perizinan, yang menurunkan efektivitas dan efisiensi yang diharapkan (Puspita & Tan, 2021); (Assegaf, 2021).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem OSS di DPMPTSP Kota Bima, diperlukan strategi manajerial yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup perbaikan infrastruktur jaringan, pelatihan petugas, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan (Thineza Ardea Pramesti et al., 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem OSS dapat lebih baik melayani masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kepercayaan publik dan investor (Arya Agung, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi manajerial yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dengan Sistem Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipilih untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas dan optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam mempercepat pembangunan di Kota Bima. Penelitian dilaksanakan di Kota Bima, dengan pemilihan lokasi yang didasarkan pada relevansi OSS sebagai sistem yang diterapkan secara lokal dan nasional. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dari 20 Mei hingga 20 Juni 2024. Waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode yang telah direncanakan. Dalam penelitian kualitatif, populasi digantikan dengan situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, dengan kriteria yang relevan dengan topik penelitian. Kepala DPMPTSP Kota Bima dipilih sebagai informan kunci, mengingat perannya dalam pengambilan keputusan terkait implementasi OSS. Selain itu, informan lain termasuk staf DPMPTSP, pelaku usaha, dan masyarakat yang menggunakan layanan OSS.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, terdiri dari kata-kata dan perilaku yang diamati. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder diambil dari dokumen-dokumen relevan, seperti laporan pemerintah dan catatan kebijakan. Kedua jenis data ini digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas OSS. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung proses pelayanan perizinan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci dan relevan lainnya, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang penggunaan OSS dalam mempercepat pembangunan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi, pengecekan dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data, penyajian data secara terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulan akhirnya diverifikasi dengan data asli untuk memastikan akurasi, sebelum digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai optimalisasi efektivitas OSS dalam mempercepat pembangunan di Kota Bima.

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima berawal dari sejumlah peraturan yang menetapkan mekanisme pelayanan administrasi perizinan secara satu pintu. Landasan awalnya adalah Peraturan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004, yang mengatur mekanisme pelayanan perizinan satu pintu di Kota Bima. Peraturan ini menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai persyaratan administratif ke dalam satu layanan terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan pelayanan publik.

Selanjutnya, Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2008 menguraikan lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu, lembaga yang merupakan cikal bakal DPMPTSP. Peraturan ini mengarahkan lembaga tersebut untuk menyediakan layanan perizinan yang cepat, efisien, dan terintegrasi guna meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kota Bima.

Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan komitmen Kota Bima dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Peraturan ini merinci bagaimana PPTSP harus beroperasi, termasuk prosedur, waktu pelayanan, dan

Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

standar layanan untuk memastikan proses perizinan berjalan efektif dan transparan.

Perubahan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014, yang memperbarui beberapa aspek dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2011. Perubahan ini merupakan respons terhadap evaluasi pelaksanaan PPTSP sebelumnya dan bertujuan untuk terus meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan perizinan di Kota Bima.

Pada tahun 2021, Kota Bima meluncurkan inovasi baru dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021. Peraturan ini memperkenalkan pendekatan berbasis risiko dalam penyelenggaraan perizinan usaha untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, diharapkan dapat mempercepat waktu pengurusan izin dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 menegaskan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko kepada Kepala DPMPTSP Kota Bima. Pendelegasian ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon perizinan, dengan tetap menjaga kontrol yang efektif atas proses tersebut.

Terakhir, Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP secara komprehensif. Peraturan ini menjadi landasan hukum dan struktural yang penting bagi DPMPTSP Kota Bima, memastikan lembaga ini beroperasi secara efisien dan efektif dalam melayani masyarakat dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, evolusi peraturan dari awal pembentukan hingga saat ini mencerminkan komitmen Kota Bima untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan adopsi pendekatan terpadu dan berbasis risiko, DPMPTSP Kota Bima bertujuan untuk menjadi motor penggerak dalam meningkatkan iklim investasi, memfasilitasi pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekosistem investasi dan mendukung kegiatan berusaha di Kota Bima. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas yang meningkat dalam proses perizinan dan bertujuan untuk mengelola proses perizinan secara lebih efisien dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkait dengan setiap jenis usaha.

Pendekatan berbasis risiko memungkinkan Kota Bima untuk menilai dan menangani risiko secara lebih terperinci, mempercepat pengurusan izin tanpa mengurangi kontrol terhadap kepatuhan hukum dan lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan sertifikat laik fungsi, untuk memastikan bahwa setiap usaha memenuhi standar operasional yang legal dan aman.

Proses perizinan dikelompokkan berdasarkan sektor kegiatan usaha, yang meliputi 16 sektor utama seperti kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, serta sektor lainnya. Setiap sektor memiliki kebutuhan dan tantangan unik yang diakomodasi melalui pendekatan berbasis risiko ini, memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha.

Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melibatkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, yang membantu menentukan prioritas dan kebutuhan pengawasan. Selain itu, kebijakan ini juga menyederhanakan persyaratan investasi untuk meningkatkan daya tarik Kota Bima sebagai lokasi investasi, mengurangi birokrasi, dan memperluas kesempatan kerja.

Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 menegaskan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memastikan keputusan dalam proses perizinan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Peraturan ini juga menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dari DPMPTSP secara detail, mendukung administrasi perizinan yang terkoordinasi dan efektif.

Mengenal Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Kota Bima, pemerintah telah mengadopsi Sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah pengurusan izin usaha. Diluncurkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, OSS memungkinkan pengusaha untuk mengurus izin secara lebih mudah, murah, dan cepat melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem OSS mulai aktif di Kota Bima pada tahun 2019. Pengusaha dapat mengakses OSS melalui situs resminya, melakukan registrasi, dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Setelah mendapatkan NIB, pengusaha dapat langsung mengajukan izin usaha sesuai kebutuhan mereka.

Keuntungan utama dari OSS adalah kemudahan akses dari berbagai lokasi, baik dari rumah maupun kantor. Pengusaha dapat mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik yang kemudian diverifikasi untuk mendapatkan izin usaha yang sah. Dokumen yang dihasilkan, termasuk NIB dan surat izin usaha, berbentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik, memiliki keabsahan hukum yang setara dengan dokumen konvensional.

Implementasi OSS di Kota Bima juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Dengan proses yang dilakukan secara elektronik, risiko kehilangan dokumen dan keterlambatan proses dapat diminimalisir. Pengusaha dapat melacak status pengajuan izin melalui dashboard OSS, memantau kemajuan permohonan izin dengan lebih efektif.

OSS memungkinkan integrasi antarinstansi terkait dalam proses perizinan, memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara dinas terkait di tingkat lokal dan nasional. Hal ini mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dan antarwilayah, serta membuka peluang bagi Kota Bima untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission di Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajerial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berfokus pada empat indikator utama: kecepatan layanan, akurasi layanan, transparansi, dan keterjangkauan.

Kecepatan Layanan

Strategi manajerial dalam hal ini mencakup penerapan teknologi digital untuk mempercepat proses perizinan. Dengan sistem OSS, DPMPTSP Kota Bima dapat mempercepat pengajuan dan pemrosesan izin, mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya panjang akibat proses manual. Sebelumnya, proses perizinan di Kota Bima bisa memakan waktu hingga satu bulan karena birokrasi yang kompleks. Dengan OSS, waktu pelayanan telah berkurang signifikan, memungkinkan pemohon untuk menyelesaikan pengajuan izin

Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

dalam waktu paling lama satu minggu. Hal ini meningkatkan kepuasan masyarakat dan mengurangi beban administratif bagi pegawai.

Akurasi Layanan

Dalam hal akurasi, strategi manajerial berfokus pada otomatisasi dan validasi data untuk mengurangi kesalahan. Sistem OSS menerapkan validasi ketat pada data yang dimasukkan, mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan bahwa informasi yang diterima dan diproses akurat. Program sosialisasi yang intensif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan perizinan, sehingga mengurangi kesalahan dalam pengajuan. Integrasi data antarinstansi juga mempermudah verifikasi dokumen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi

Transparansi

Untuk meningkatkan transparansi, strategi manajerial DPMPTSP Kota Bima mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur perizinan. Sistem OSS menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat untuk memantau status permohonan mereka secara real-time, serta mengakses informasi terkait persyaratan dan prosedur secara transparan. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perizinan dan mengurangi ketidakpastian dalam proses.

Keterjangkauan

Dalam meningkatkan keterjangkauan, strategi manajerial berfokus pada penyediaan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Dengan OSS, masyarakat dapat mengakses layanan perizinan dari mana saja melalui internet, mengurangi kebutuhan untuk perjalanan fisik yang dapat membebani pemohon. Sistem ini juga mengurangi biaya administrasi dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin, menjadikan layanan perizinan lebih efisien dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan sistem OSS di DPMPTSP Kota Bima telah berhasil mengoptimalkan efektivitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kecepatan, akurasi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi manajerial yang efektif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik

Kesimpulan

Strategi manajerial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Penerapan OSS telah berhasil menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, mengurangi waktu pelayanan dari satu bulan menjadi maksimal satu minggu, yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat dan efisiensi administrasi. Strategi ini juga meningkatkan akurasi layanan melalui otomatisasi dan validasi data, serta transparansi dengan menyediakan portal yang memungkinkan pemantauan status permohonan secara real-time. Selain itu, OSS mempermudah akses layanan bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin. Implementasi kebijakan berbasis risiko yang diperkenalkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 telah memperkuat fleksibilitas dan responsivitas

pelayanan perizinan, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan menarik investasi. Secara keseluruhan, penerapan OSS di Kota Bima mencerminkan kemajuan strategis dalam reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

BIBLIOGRAFI

- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 160–166. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Arya Agung, H. P. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4862>
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150.
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69–79.
- Kota, D. I., & Aceh, B. (2021). 3) 1,2. 1(3), 175–188.
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25–34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Mbojo, U., & Mbojo, U. (2024). *REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BUREAUCRATIC REFORM OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF BIMA*. 4(3), 83–89.
- Naipos-Pos, F. J. S. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4), 1–10.
- Prabawati, I., Sos, S., Si, M., Publik, J. A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2018). *IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN NGANJUK* Anis Nur Fadhilah *SI Ilmu Administrasi Negara*, Fakul.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652–674. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Putri, A., Wibowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis persepsi dan partisipasi nelayan terkait kebijakan izin berusaha perikanan tangkap melalui sistem online single submission (oss) bagi nelayan di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor,

Syamsuddin, Muhammad Nur, Mas'ud, Haeril

- Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2), 1–6.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.
- Robby, U. B. dan Tarwini, T. (2019). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang. *Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 75–85. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492>
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(91), 79.
- Tasrif, T., & Haeril, H. (2024). Optimizing the Public Relations and Government Protocol communication strategy of Bima District Local Government in building a positive image. *The International Journal of Politics and ...*, 12(1), 24–33.
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah, A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96–104.
- Wulandari, A. S. R., Habiba, H., & Rahmah, A. (2023). Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia. *Gema Keadilan*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20070>

Copyright holder:

Syamsuddin, Muhammad Nur, Mas'ud, Haeril (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

